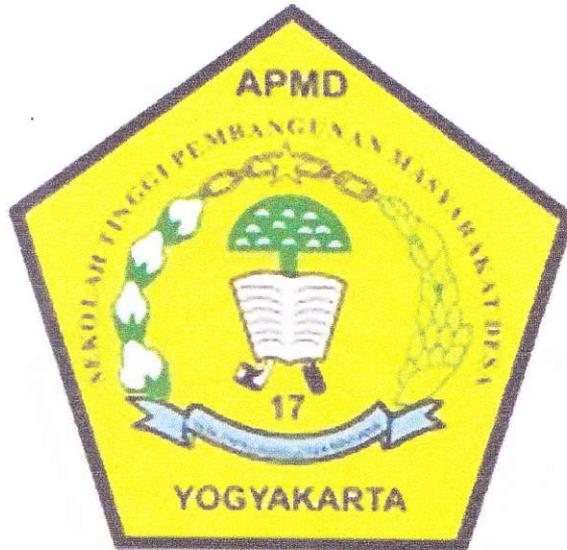


SKRIPSI

PRAKTEK GOVERNANCE

Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten

Gunungkidul, DIY



Disusun Oleh:

PATRISIUS ARLINDO OBA

13520184

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2017



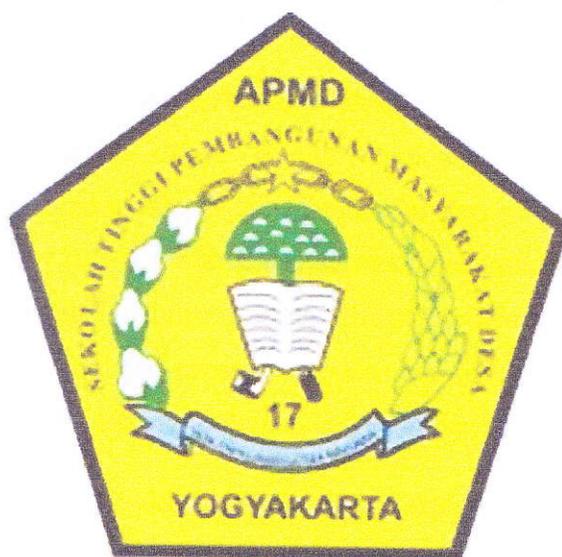
Praktek Governance

Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten

Gunungkidul, DIY

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

PATRISIUS ARLINDO OBA

13520184

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD” YOGYAKARTA

2017



PERNYAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patrisius Arlindo Oba

Nim : 13520184

Judul skripsi : *Praktek Governance* Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjung Sari,
Kabupaten Gunungkidul, DIY

Diajukan untuk diuji pada hari dan tanggal: Rabu, 9 Agustus 2017

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini:

(1) tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan sendiri; (2) tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis alinya; (3) tidak terdapat proses rekayasa data atau melakukan perubahan data penelitian orang lain yang saya akui sebagai data hasil penelitian saya.

Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa saya melakukan plagiat pada naskah ini baik sengaja maupun tidak, saya menyatakan menarik skripsi yang telah saya ajukan sebagai hasil karya saya dan berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" dinyatakan batal dan segala konsekuensi hukum yang ada melekat pada saya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 2017

Yang membuat pernyataan



Patrisius Arlindo Oba

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Agustus 2017
Pukul : 10 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD"

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Gregorius Sahdan, S.IP.,MA

Ketua/Penguji/Pembimbing



Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si

Penguji Samping 1



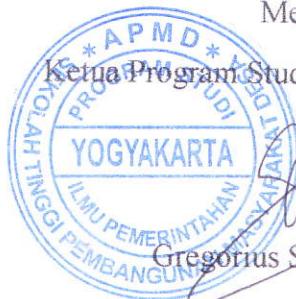
Dra. Sri Utami, M.Si

Penguji Samping 2



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sahdan, S.IP.,MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menghaturkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah melimpahkan Rahmat, dan Anugerah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat yang begitu melimpah sehingga dari awal penyusunan, ketika penelitian hingga skripsi ini siap diujikan, serta kepada kedua orang tua dan adik-adik yang sudah sangat membantu dan dengan sepenuh hati memberikan dukungan selama perkuliahan. Khususnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah bersusah payah untuk menafkahi saya selama kurang lebih 4 tahun di tempat perkuliahan. Tanpa mereka maka penulis tidak akan sampai pada tahap ini, tahap dimana penulis akan menyelesaikan perkuliahan dalam usaha untuk meraih gelar sarjana. Penulis sungguh menyadari bahwa selama perkuliahan banyak suka duka yang di alami, banyak kendala yang dihadapi akan tetapi ada orang-orang hebat dan tulus yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis selalu mempunyai semangat untuk kuliah hingga sampai pada tahap ini.

Di akhir persembahan ini, penulis meyakini bahwa kedua orang tua terhebat yaitu pernah penulis miliki akan memperoleh berkat yang melimpah atas kebaikan yang mereka berikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTEK GOVERNANCE ”** di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dengan lancar.

Pada dasarnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang sangat membantu , oleh karena itu penulis juga tidak bisa bekerja sendiri, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan, bantuan baik berupa dukungan moril maupun dukungan material. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Habib Muchsin, S. sos, M. Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
3. Dra. Herawati, MPA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Ibu dan Bapak serta Arisona, Rivan, Ival, & Firlan yang sangat mendukung.
5. Keluarga di Gebang, pak Kirdi, Ibu Suti, Mbah Rejo, Mas Ali, Adik Anis, serta semua warga padukuhan Gebang.
6. Pemerintah Desa Kemiri dan seluruh masyarakat Desa Kemiri yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi
7. Angela yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materi

dalam kepada penulis dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini

1. Teman-teman seperjuangan STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2013 yang sudahbersama-sama berjuang dan saling membantu semasa proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
2. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak secara langsung dalam penulisan skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis masih merasa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis paparkan, dapat memberikan sebuah manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 2017

PATRISIUS ARLINDO OBA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SINOPSIS.....	xii

BAB 1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KERANGKA TEORI	13
1. <i>Governance</i>	13
2. <i>Good Governance</i>	18
3. Desa.....	27
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN	38
G. METODE PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Unit Analisis	40
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. TEKNIK ANALISIS DATA	42

BAB II. PROFIL DESA KEMIRI

1. KEADAAN WILAYAH.....	44
2. KEADAAN DEMOGRAFI.....	48
3. LEMBAGA PEMERINTAHAN	54
4. LEMBAGA KEMASYARAKATAN	59

BAB III. PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI INFORMAN	62
B. ANALISIS DATA PENELITIAN	68
1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.....	68
2. Responsivitas Pemerintah Desa Kemiri terhadap ide, aspirasi dan tuntutan masyarakat	79
3. Keterbukaan Pemerintah Desa Kemiri terhadap program , Pembiayaan, dan informasi-informasi lainnya	89
4. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kemiri atas program yang telah dilaksanakan	98

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 sumber air bersih dan penggunaannya	49
Tabel II. 2 jumlah penduduk.....	50
Tabel II. 3 Jumlah penduduk berdasarkan golongan usia.....	51
Tabel II. 4 Jumlah pendudukmenurut tingkat pendidikan	52
Tabel II. 5 Jumlah penduduk menurut pekerjaan	53
Tabel III.1 Distribusi Informan secara umum	63
Tabel III. 2 Distribusi informan menurut usia	64
Tabel III. 3 Distribusi informan menurut jenis kelamin	65
Tabel III. 4 Distribusi informan menurut pekerjaan	66
Tabel III. 5 Distribusi informan menurut tingkat pendidikan.....	67

DAFTAR GAMBAR & BAGAN

Gambar 2.1 Peta Desa Kemiri	46
Bagan 2.2 Struktur Perangkat Desa Kemiri.....	55

SINOPSIS

Desa pada umumnya belum mempraktekkan *governnace* . Hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi dimana masyarakat yang merupakan sebuah elemen penting dalam pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam responsivitas pemerintah desa banyak yang kurang mampu menanggapi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga pemerintah desa tidak mampu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu respon pemerintah terhadap aspirasi seperti ide-ide dari masyarakat kadang tidak diindahkan yang kemudian mengakibatkan pembangunan desa menjadi tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan selama ini masih belum bisa memuaskan masyarakat, terkadang masyarakat dipersulit dengan banyaknya alasan yang sering pemerintah desa berikan sehingga sangat merugikan masyarakat. Di bidang transparansi masalah yang sering dialami oleh pemerintah desa adalah ketidakmampuan kepala desa dan staf-stafnya dalam membuat perencanaan desa, serta tertutupnya informasi sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh informasi dengan jelas. Dengan transparansi jelas mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik di desa. Akuntabilitas pemerintah desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kadang hanya diketahui oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan kadang pula muncul permasalahan akibat tidak jelesnya pertanggungjawaban pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktek governance di desa.

Rumusan masalah skripsi ini adalah “Bagaimana Praktek *Governance* di lihat dari partisipasi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta?”

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan objek penelitian apa yang sesuai dengan data yang diperoleh. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini pemerintah desa Kemiri. Obyek penelitian adalah praktek Governance di desa Kemiri, sedangkan Subyek penelitian adalah 5 perangkat desa dan 5 masyarakat umum desa Kemiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi enelitian termasuk hasil pengamatan peneliti. Tekniks analisi data menggunakan kualitatif.

Setelah melakukan penelitian pada pemerintah desa Kemiri, maka peneliti berkesimpulan bahwa praktek governance di desa Kemiri sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. *Pertama*, partisipasi masyarakat belum mempunyai jalur yang jelas karena yang terjadi selama ini partisipasi masyarakat di lakukan melalui musyawarah di tingkat padukuhan. *Kedua*, responsive, pemerintah belum mempunyai inisiatif agar turut dalam rapat-rapat di padukuhan. Karena dalam rapat-rapat padukuhan masyarakat akan menyampaikan ide-idenya. Dengan terjun langsungnya pemerintah desa maka aspiarsi dari masyarakat dapat didengarkan secara langsung. *Ketiga*, transparansi pemerintah desa kememiri sudah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya rencana anggaran belanja yang diberikan kepada padukuhan apabila

ada pembangunan/kegiatan. Seperti yang terjadi di padukuhan Gebang. Ini merupakan salah satu contoh keterbukaan pemerintah desa Kemiri terhadap masyarakatnya. Hanya saja masih didapati kelemahan yaitu belum dimanfaatkannya lembaga-lembaga yang ada di desa di dalam upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat, selain itu pemanfaatan sarana-sarana public belum efektif. *Keempat*, pertanggungjawaban pemerintah desa Kemiri terhadap penggunaan dana serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sudah ada. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk sebuah laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2016. Laporan tersebut akan di sampaikan juga kepada masyarakat melalui rapat padukuhan.

Pemerintah desa Kemiri didalam menjalankan roda pemerintahannya harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan .pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Governance*, Partisipasi, Resposivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas

lllpembangunan/kegiatan. Seperti yang terjadi di padukuhan Gebang. Ini merupakan salah satu contoh keterbukaan pemerintah desa Kemiri terhadap masyarakatnya. Hanya saja masih didapati kelemahan yaitu belum dimanfaatkannya lembaga-lembaga yang ada di desa di dalam upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat, selain itu pemanfaatan sarana-sarana public belum efektif. *Keempat*, pertanggungjawaban pemerintah desa Kemiri terhadap penggunaan dana serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sudah ada. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk sebuah laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2016. Laporan tersebut akan di sampaikan juga kepada masyarakat melalui rapat padukuhan.

Pemerintah desa Kemiri didalam menjalankan roda pemerintahannya harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Governance*, Partisipasi, Resposivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas

,BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya dimana dalam tata penyelenggaraan pemerintahan berbagai elemen dapat turut terlibat, mempengaruhi dan mengarahkan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.

Begitupun yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai demokrasi harus diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, misalnya dalam rapat-rapat di tingkat desa maupun dalam pembangunan secara fisik. Akan tetapi hal-hal tersebut belum tampak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini. Tidak lancar dan berjalannya pemerintah desa salami ini sangat di pengaruhi oleh berbagai factor di antaranya adalah partisipasi masyarakat, responsivitas pemerintah desa, transparansi pemerintah desa, dan akuntabilitas pemerintah desa. Ke empat hal tersebut sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah desa.

Hal ini berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2015 yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada pertengahan 2015. Dengan menggunakan 3 domain: sosial, ekonomi, dan ekologi teridentifikasi 174 desa mandiri. Indeks merupakan penilaian dari 54 indikator. Pengukurang ini menunjukkan bahwa baru terdapat 174 (0,24%) desa dengan status mandiri dari 73.709 desa yang

diukur. Sisanya berada pada status desa sangat tertinggal 13.453 desa (18,25%), desa tertinggal 33.592 desa (45,57%), desa berkembang 22.882 desa (31,04%), serta desa maju 3.608 desa (4,89%).. Penyebab ketertinggalan desa-desa tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat . Masalah partisipasi yang masih menjadi penghalang menjadi suatu hal yang sulit di kesampingkan karena untuk membantu suatu desa berkembang dan maju dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan yaitu masyarakat dan aparatur desa. Partisipasi warga dalam rangka pembangunan desa wajib dihadirkan mengingat keberadaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di desa. Partisipasi masyarakat dalam berbagai hal seperti penyusunan program, penyusunan RPJMDes, dan berbagai hal merupakan suatu tolak ukur bagi suatu desa dalam rangkan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di desa. Masyarakat yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak diberi kesempatan untuk bersuara, mengakses dan mengontrol pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa akibat dari hal terebut sering kali muncul masalah yang cukup serius terjadi yaitu hasil yang dicapai dalam suatu pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapakan oleh masyarakat tentu saja hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi warga dalam proses suatu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Di Desa Kemiri belum dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih menjadi sala satu alasan sehingga belum efektif dan efisiennya pelayanan. Dalam konteks ini, pemdes jelas tidak partisipasi, tidak aspiratif, tidak responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Bukan hanya di sisi partisipasi yang membuat desa-desa tertinggal akan tetapi di sisi transparansi juga adalah penyebabnya.

Transparansi dalam berbagai hal merupakan sesuatu yang sangat penting. Adanya keterbukaan dari pemerintah desa masih suatu hal yang belum terpenuhi untuk saat ini. Transparansi dalam hal ini mencakup informasi, program-program dalam rangka pembangunan desa dan yang takkالا penting adalah transparansi tentang keuangan desa yang masuk dan yang digunakan dalam rangka pembiayaan berbagai program atau kegiatan. Dalam transparansi masalah yang sering dialami oleh pemerintah desa adalah ketidakmampuan para kepala desa dan jajarannya dalam membuat perencanaan desa, tertutupnya informasi sehingga masyarakat tidak bisa mendapat/ memperoleh informasi dengan jelas, tidak adanya media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi-informasi baru seperti adanya perubahan tentang biaya pajak dan bangunan dan lain sebagainya mengingat keberadaan masyarakat yang berada di padukuhan/dusun cukup mempunyai jarak dengan pusat pemerintahan desa, tentu saja hal ini akan sangat mempenagrahu terhadap upaya penyebarluasan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat desa. Tanpa adanya transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di desa. Akibatnya berbagai program atau kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa dan hal itu akan mengurangi kualitas program atau tindakan tersebut serta kadang hasil dari keputusan yang telah diambil merugikan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Program atau kebijakan yang di ambil secara sepihak oleh pemerintah desa dan kadang terkesan dipaksakan karena dalam kenyataan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Di sisi lain keterbukaan pemerintah desa atas keadaan yang sesungguhnya jarang ditampilkan ketika berada dalam suatu forum rapat

resmi yang melibatkan banyak kalangan dari dalam desa Kemiri maupun dari luar Desa Kemiri. Yang dimaksudkan adalah ketika aparat pemerintah desa lain memaparkan keadaan desa yang sesungguhnya di depan forum rapat, kepala desa tidak suka akan hal itu seperti yang dikatakan oleh salah satu aparat pemerintah Desa Kemiri. Masalah yang ditemukan juga adalah, ketika pemerintah melakukan suatu kegiatan pembangunan fisik yang melibatkan masyarakat desa Kemiri rencana anggaran belanja (RAB) tidak diberikan kepada kepalaksana yaitu masyarakat. Jelas hal tersebut menunjukkan ketidakterbukaan pemerintah desa Kemiri. Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

Dengan adanya transparansi penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dilakukan oleh pemerintahan desa, dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu dengan adanya transparansi dapat mempersempit terjadinya tindakan korupsi di kalangan pemerintah desa (Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, dan perangkat desa) dengan terlihatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam artian control dari masyarakat akan lebih muncul dan jelas. Apalagi

saat ini desa sangat diperhatikan dengan diberikan dana desa dalam jumlah yang sangat banyak tentu hal ini menjadi factor pendorong harus di tampilkan transparansi. Bukan sekedar ditampilkan melalui transparansi akan tetapi sebagai pemerintah desa yang mempunyai perlindungan hukum, tanggung jawab dari pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Misalnya dalam alokasi dana desa (ADD), pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Desa (LPJ), pemerintah desa masih banyak belum melibatkan masyarakat dalam proses kesepakatan dan masyawarah serta dalam melaksanakan kegiatannya padahal kita ketahui bersama bahwa usulan atau suara masyarakat sangat penting apabila akan mengadakan suatu kegiatan karena di zaman yang demokrasi ini pemerintah desa dan masyarakat harus duduk bersama untuk membahas dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan desanya.

Responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara pemerintah. Karena Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan,2005:177). Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1991). Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan

oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan dalam hal ini pemerintah desa. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi, ide-ide, ataupun keluhan dari masyarakat harus ditindaklanjuti karena sebagai pelayanan masyarakat pemerintah desa sudah sewajarnya dan ini merupakan tugas. Di tingkat desa, pemerintah desa berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk menampung hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat dan yang paling penting pemerintah desa harus mampu merespon atau memberi tanggapan terhadap keluhan ataupun ide-ide yang berasal dari masyarakat. Banyak fenomena yang terjadi selama ini pemerintah tidak menanggapi ide-ide yang menjadi kebutuhan masyarakat akibatnya antara apa yang dilakukan pemerintah dengan harapan masyarakat tidak selaras atau tidak sesuai dan pada akhirnya menimbulkan rasa kecewa oleh masyarakat.

Di dalam menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah desa banyak yang kurang mampu menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Akibat dari ketidakmampuan pemerintah desa, banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan atau diberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Kadang pelayanan yang diberikan belum optimal dan masih mendapat keluhan atau respon yang negative dari masyarakat. Masyarakat kadang mengeluh karena berbagai alasan akan diberikan oleh pemerintah desa atas apa yang diinginkan

masyarakat. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat umum. Hal ini tentu dipengaruhi oleh gaya pemerintah yang relative lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat luas, sebab pemerintah desa kurang bersungguh-sungguh dalam memberdayakan masyarakatnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berimbas pada masyarakat, padahal dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengharuskan tiap-tiap desa atau pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance guna menciptakan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Isi peraturan tersebut merupakan sepenuhnya memihak kepada kepentingan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum nampak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai contoh, mengutip Pos Kupang bahwa “ Pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur masih memprihatinkan dan masih jauh dari harapan masyarakat. Hasil riset yang dilakukan Stimulant Institute Sumba dengan sasaran lima jenis pelayanan publik menemukan banyak persoalan. Lima jenis layanan publik dimaksud, yaitu layanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kesehatan, pendidikan, PLN dan PDA. Hasil riset menemukan, pelayanan KTP, misalnya 37,3 persen responden merasakan waktu pengurusan lama, 30 persen menyatakan proses pengurusan berbelit-belit.” Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang di berikan oleh pemerintah masih mengalami permasalahan. Hal ini tentu saja akan mendapatkan dampak yang kurang positif dari masyarakat hal ini terlihat dengan berbagai tuntutan pelayanan public sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai obyek bukan subyek.

Konsep akuntabilitas ini menuntut adanya kepastian hukum yang jelas, tegas , diketahui masyarakat desa di satu pihak, serta upaya penegakkan hukum yang efektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indicator penting dalam penimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintah desa, legitimasi di hadapan rakyat, serta pemangku kepentingan di desa.

Pertanggung jawaban merupakan wujud dari apa yang telah pemerintah lakukan. Dan pertanggung jawaban ini harus diketahui oleh masyarakat. Misalnya pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap apa yang telah dikerjakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang dibuat setiap 5 tahun sekali dan juga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dibuat setiap tahunnya sebagai wujud pertanggungjawaban secara tertulis.

Masalah yang ditemukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa Kemiri dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilakukan secara efektif, hal ini disebabkan karena laporan pertanggungjawaban dalam bentuk LPJ pada akhir tahun tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut. Di sisi lain minimnya media penyebarluasa informasi tentang laporan pertanggungjawaban menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kemiri.

Perlunya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap semua kegiatan ataupun program sangat penting guna memberikan kepastian kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban harus ada pada setiap akhir tahun dan dalam laporan tersebut hendaknya berisikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik mengenai waktu

pelaksanaan maupun tentang semua pembiayaannya intinya laporan tersebut harus berisikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Isu *governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi warga.

Ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di Negara ini diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya public, efektif menjalankan fungsi pelayanan public, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan social. Sejalan dengan harapan baru tersebut terhadap peran Negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan public, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi public lainnya, tidak apatis , serta tidak mementingkan diri sendiri. Adanya perubahan di sisi pemerintah dan warga seperti di atas , berarti adanya perubahan dalam pola *governance*.

Pentingnya penerapan *good governance* di beberapa Negara sudah meluas mulai tahun 1980-an dan di Indonesia *good governance* mulai diperkenalkan secara mendalam tahun 1990-an sebagai wacana penting yang muncul dalam pembahasan, diskusi, penelitian dan dilingkungan pemerintah serta dunia swasta. Sejak krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1980-an, setia desa harus bisa menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar bisa memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap masyarakat secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Desa ideal tentu saja desa yang berpedoman pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang baik. Dengan menjalankan prinsip *good governance*, maka pemerintah desa tidak akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan masyarakat, hal ini penting demi terciptanya suatu politik pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa proses pemerintahan yang itu dari segi proses perumusan kebijakan public, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi public pemerintah agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang mengrefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dengan menerapkan *rule of law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintah yang harus dijadikan pedoman penyelenggaraan kehidupan di dalam pemerintah desa. Penerapan *good governance* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintah desa yang efektif, efisien, mandiri serta bebas KKN.

Konteks pengelolaan desa yang berdasarkan prinsip *good governance* atau desa ideal adalah yang transparansi yang berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti peraturan desa dan peraturan-

peraturan lainnya yang merupakan hasil produk dari desa itu sendiri. Ketersediaan informasi yang handal dan berkala harus dapat diakses oleh public yang dibangun atas pijakkan kebebasan arus informasi yang memadai untuk dipahami dan untuk kemudian dapat dipantau. Dengan adanya keterbukaan jelas akan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan public, karena penyebaran informasi selama ini aksesnya hanya dilakukan oleh pemerintah desa, dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan.

Desa berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat desa. Nampaknya pemerintah desa belum mampu melihat secara luas dan menyeluruh tentang hal tersebut. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan perannya harus mampu secara efektif dan efisien demi terwujudkan pemerintah yang lebih baik sesuai dengan *good governance*. Kinerja pemerintah desa dapat dicermati dari praktek pelayanan public dan koodinasi kegiatan pemerintah dengan perangkat desa. Penyelewengan-penyelewengan oleh pemerintah desa karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* membuat penulis akhirnya tertarik melihat bagaimana praktek *good governance* di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Basuki-Sulistyo. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Beratha, N. (1982). *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman, A. (2006). *kebebasan, negara, pembangunan* . jakarta: pustaka Alvabet.
- Eko, S. (2005). *Pembaharuan otonomi daerah*. yogyakarta: APMD Press.
- Eko, S. (2014). *desa membangun indonesia*. yogyakarta: access.
- Gerald, C. (1991). *Administrative Reforms Comes Of Age*. New York : Walter The Gruyter.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hessel, T. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bouman P. (1980). *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*.
- Koentjaraningrat. (1967). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Kartohadikusumo, S. (1953). *Desa*. Jogjakarta: Sumur Bandung.
- Krina. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Transparan, Partisipasi, Dan Akuntabilitas*.
Jakarta. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional.

- Keban, Y. (2011). *Memahami Good Governance*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljarto, T. (2001). *Birokrasi Dalam Polemik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nawawi, H. (19910). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Rakhmat, Jalaludin. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi, dan Kepemimpinan Msa
Depan*. Bandung : Refika Aditama.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shofwan, A. B. (2006). *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang:
SPOD-FE UNIBRAW.
- Sugiyanto. (2010). *Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak*. Yogyakarta: APMD
Press.
- Suharto, D. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota
IKAPI).
- Sumarto, H. (2004). *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
- Sumarto, Hetifah. 2004. *Inovasi parsipasi dan Good Governance*. Jakarta. Yayasan Obor
Indonesia.

Toha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Tangkilisan, H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahyudi, P. &. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Gaya Media.

Referensi lain

Skripsi Junitur (11520025). *Praktik Good Governance Di Desa*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal ilmu social alternative. Volume X, No, 2, Desember 2009. ISSN 1411-3821

<http://stkipbima.ac.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>. Di akses 22-6-2017).

Robinson, J.A., and Parsons, Q.N.,(2006). “State Formation and Governance in Botswana”, *Journal of African Economies*, 15 (1): 100-140.

http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL2.pdf) di akses tanggal 9-7-17

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341819&val=7930&title=MEMBANGUN%20GOVERNANCE%20MELALUI%20%20PENDIDIKAN%20MORALITAS>. Di kses pada tanggal 27 juli 2017

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=420675&val=4349&title=PENGARUH%20PELAYANAN%20BIDANG%20PENERBITAN%20SERTIFIKAT%20TANAH%20TERHADAP%20KEPUASAN%20MASYARAKAT%20PADA%20KANTOR%20BADAN%20PERTANAHAN%20NASIONAL%20KOTA%20MAKASSAR>. Di kses tanggal 30 Juli 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Basuki-Sulistyo. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Beratha, N. (1982). *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman, A. (2006). *kebebasan, negara, pembangunan* . jakarta: pustaka Alvabet.
- Eko, S. (2005). *Pembaharuan otonomi daerah*. yogyakarta: APMD Press.
- Eko, S. (2014). *desa membangun indonesia*. yogyakarta: access.
- Gerald, C. (1991). *Administrative Reforms Comes Of Age*. New York : Walter The Gruyter.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hessel, T. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bouman P. (1980). *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*.
- Koentjaraningrat. (1967). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Kartohadikusumo, S. (1953). *Desa*. Jogjakarta: Sumur Bandung.
- Krina. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Transparan, Partisipasi, Dan Akuntabilitas*.
Jakarta. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional.

- Keban, Y. (2011). *Memahami Good Governance*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljarto, T. (2001). *Birokrasi Dalam Polemik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nawawi, H. (19910). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Rakhmat, Jalaludin. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi, dan Kepemimpinan Msa
Depan*. Bandung : Refika Aditama.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shofwan, A. B. (2006). *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang:
SPOD-FE UNIBRAW.
- Sugiyanto. (2010). *Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak*. Yogyakarta: APMD
Press.
- Suharto, D. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota
IKAPI).
- Sumarto, H. (2004). *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
- Sumarto, Hetifah. 2004. *Inovasi parsipasi dan Good Governance*. Jakarta. Yayasan Obor
Indonesia.

Toha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Tangkilisan, H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahyudi, P. &. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Gaya Media.

Referensi lain

Skripsi Junitur (11520025). *Praktik Good Governance Di Desa*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal ilmu social alternative. Volume X, No, 2, Desember 2009. ISSN 1411-3821

<http://stkipbima.ac.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>. Di akses 22-6-2017).

Robinson, J.A., and Parsons, Q.N.,(2006). “State Formation and Governance in Botswana”, *Journal of African Economies*, 15 (1): 100-140.

http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL2.pdf) di akses tanggal 9-7-17

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341819&val=7930&title=MEMBANGUN%20GOVERNANCE%20MELALUI%20%20PENDIDIKAN%20MORALITAS>. Di kses pada tanggal 27 juli 2017

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=420675&val=4349&title=PENGARUH%20PELAYANAN%20BIDANG%20PENERBITAN%20SERTIFIKAT%20TANAH%20TERHADAP%20KEPUASAN%20MASYARAKAT%20PADA%20KANTOR%20BADAN%20PERTANAHAN%20NASIONAL%20KOTA%20MAKASSAR>. Di

kses tanggal 30 Juli 2017.